

Analisis Belanja Modal Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Kalimantan Tengah Periode Tahun 2019- 2023

Nouval Aqil Rakhman¹, Rindiyanii², Gusnia Devianti³, Dewanto William Lumbantobing⁴,
Dicky Perwira Ompusunggu⁵, Suherman⁶

Universitas Palangka Raya

Email: nouvalaqilrakhman91@mhs.feb.upr.ac.id¹, rindiyanii2812@gmail.com²,
gusniadevianti20@gmail.com³, dewantotobing1@gmail.com⁴, dickyperwira@feb.upr.ac.id⁵,
suherman@feb.upr.ac.id⁶

Article History:

Received: 31 Mei 2025

Revised: 24 Juli 2025

Accepted: 01 Agustus 2025

Keywords: *Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Kebijakan Fiskal*

Abstract: *Penelitian ini mengkaji pengaruh belanja modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di enam kabupaten Kalimantan Tengah, periode 2019–2023. Data panel sekunder sebanyak 30 observasi dianalisis menggunakan regresi berganda guna mengungkap kontribusi masing-masing variabel terhadap variasi kemiskinan. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif signifikan (koefisien = 0,015; Sig = 0,017), sedangkan IPM tidak berpengaruh signifikan (koefisien = -0,085; Sig = 0,297). Uji F mengonfirmasi signifikansi model (Sig = 0,036) dengan R Square sebesar 0,160. Temuan ini mendukung teori pertumbuhan endogen serta memberikan dasar bagi optimalisasi belanja modal guna penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Analisis ini penting bagi kebijakan.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bangsa Indonesia memiliki cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warganya. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mendorong pemerintah aktif melaksanakan program-program pembangunan. Tujuan utama pembangunan tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja ekonomi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

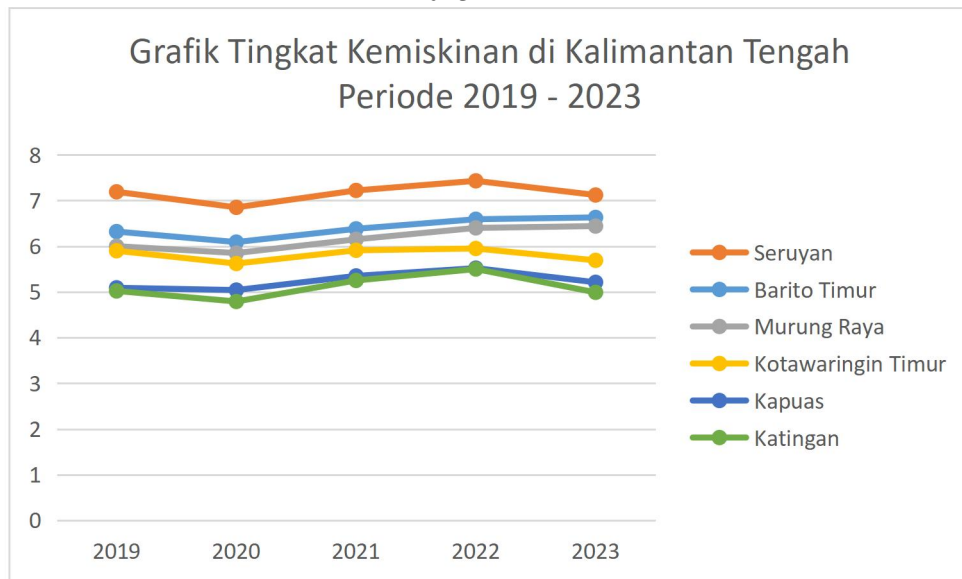
Seseorang dapat diklasifikasikan sebagai miskin apabila ia mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan fisik esensial, seperti asupan nutrisi, tempat berteduh, dan sandang dasar. Fenomena kemiskinan, dalam hakikatnya, merupakan persoalan sosiologis-ekonomis yang inheren dan meluas di setiap wilayah baik pada level regional maupun nasional. Kondisi ini juga berkaitan erat dengan keterbatasan akses terhadap peluang kerja di suatu daerah. Dengan demikian, individu yang tergolong dalam kelompok miskin adalah mereka yang tidak hanya menghadapi pengangguran, tetapi juga kekurangan fasilitas fundamental dalam ranah pendidikan

dan kesehatan (Estrada & Wenagama, 2020).

Penurunan angka prevalensi kemiskinan merupakan salah satu imperatif sentral dalam agenda pembangunan nasional. Secara diakronis, problematika deprivasi material ini telah menjadi fenomena yang persisten, di mana pada masa lampau, etiologinya tidak semata-mata tereduksi pada defisit subsisten pangan, melainkan lebih fundamental berakar pada restriksi aksesibilitas terhadap infrastruktur elementer serta pemenuhan kebutuhan primer. Bahkan dalam konstelasi sosio-ekonomi kontemporer, masih teridentifikasi segmen-segmen masyarakat yang mengalami eksklusi dari akses universal terhadap layanan edukasi, provisi kesehatan, dan berbagai amenities publik esensial lainnya yang seyogianya terjamin ketersediaannya secara merata (Demak et al., 2020).

Menurut Bank Dunia, kemiskinan di suatu negara seringkali berakar dari keterbatasan pemasukan dan kekayaan negara dalam menyediakan keperluan primer warganya mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan, hingga standar kesehatan yang memadai. Karena kemelaratan ini merupakan persoalan yang amat serius, diperlukan komitmen tersendiri dari pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan strategis untuk mengentaskan kondisi tersebut. Dengan demikian, implementasi inisiatif penanggulangan kemiskinan telah dijadikan sebagai tujuan pembangunan esensial serta menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas berbagai program pembangunan di tingkat daerah (Pratama & Utama, 2019).

Gambar 1 Grafik Tingkat Kemiskinan 6 Kabupaten di Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023



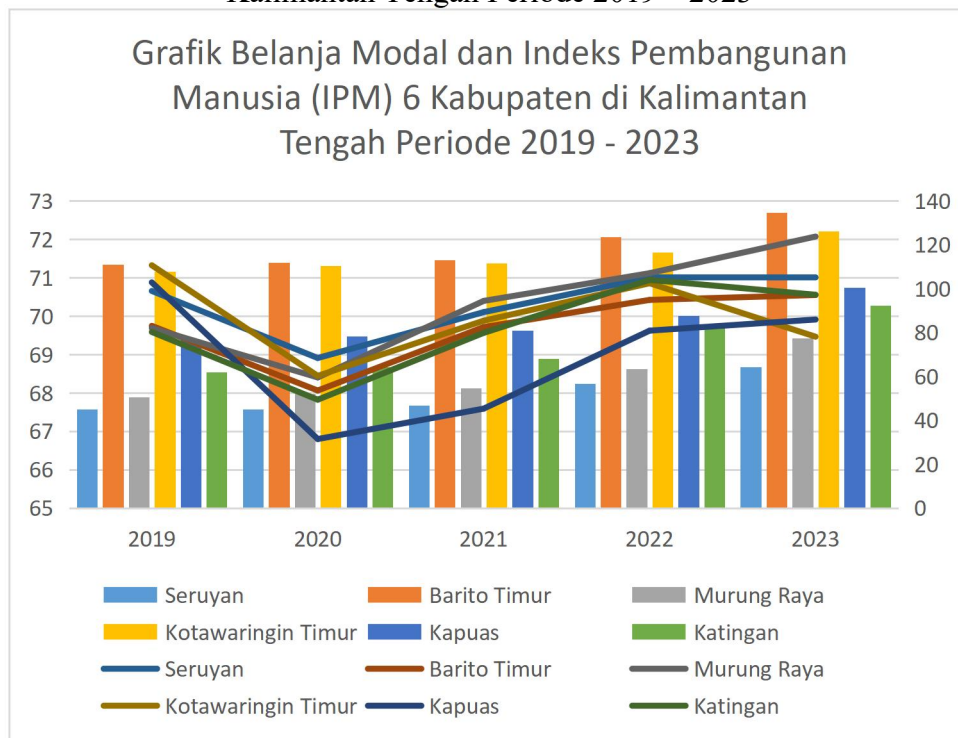
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

Berdasarkan gambar 1.1, Di Kabupaten Seruyan, angka kemiskinan dimulai pada 7,19% (2019), menurun ke 6,85% (2020), kemudian naik menjadi 7,22% (2021), sedikit meningkat ke 7,43% (2022), dan turun menjadi 7,12% (2023). Kabupaten Barito Timur menunjukkan tren awal penurunan dari 6,32% (2019) ke 6,09% (2020) dan kemudian mengalami kenaikan moderat ke 6,38% (2021), 6,59% (2022), serta 6,63% (2023). Sementara itu, Kabupaten Murung Raya mencatat penurunan dari 6,00% (2019) ke 5,85% (2020) sebelum naik ke 6,15% (2021) dan 6,40% (2022), dengan sedikit penurunan ke 6,44% (2023). Di Kotawaringin Timur, tingkat kemiskinan turun dari 5,90% (2019) ke 5,62% (2020), naik ke 5,91% (2021), mencapai 5,95% (2022), dan akhirnya turun ke 5,69% (2023). Di Kabupaten Kapuas, tren yang muncul adalah 5,09% (2019), 5,04% (2020), kenaikan ke 5,35% (2021), mencapai 5,52% (2022), dan penurunan

ke 5,21% (2023). Sementara itu, di Kabupaten Katingan, angka kemiskinan turun dari 5,02% (2019) ke 4,79% (2020), kemudian meningkat menjadi 5,25% (2021) dan 5,50% (2022) sebelum kembali turun ke 4,99% (2023). Secara keseluruhan, perbedaan tren antar kabupaten ini mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan dan kondisi ekonomi lokal sangat bervariasi, sehingga menuntut pendekatan kebijakan yang lebih terspesialisasi guna mencapai penurunan angka kemiskinan yang lebih konsisten dan berkelanjutan.

Secara garis besar, otoritas daerah dituntut untuk memaksimalkan potensi pendapatan dengan menyalurkan anggaran belanja publik ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Misalnya, peresmian belanja yang bersifat produktif, seperti investasi modal dalam pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mendorong penciptaan lapangan kerja serta peningkatan mutu layanan publik. Dengan perbaikan signifikan dalam pelayanan publik tersebut, secara implisit akan terjadi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang selanjutnya memacu kinerja ekonomi. Penyerapan anggaran yang efektif dan efisien merupakan inti dari mekanisme pelayanan publik sebuah sasaran nasional esensial karena belanja pemerintah berperan sebagai instrumen kunci dalam mendorong dinamika ekonomi daerah (mukarramah et al., 2019).

Gambar 2 Grafik Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 6 Kabupaten di Kalimantan Tengah Periode 2019 – 2023



Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Portal Data SIKD (diolah)*

Berdasarkan gambar tersebut, di Kabupaten Seruyan, nilai IPM dimulai pada 67,57% (2019), sedikit meningkat menjadi 67,58% (2020), kemudian naik menjadi 67,67% (2021), meningkat lebih lanjut ke 68,24% (2022), dan mencapai 68,68% (2023). Kabupaten Barito Timur menunjukkan tren peningkatan yang stabil, mulai dari 71,34% (2019) ke 71,39% (2020), kemudian naik menjadi 71,47% (2021), meningkat ke 72,07% (2022), serta mencapai 72,70% (2023). Sementara itu, Kabupaten Murung Raya mencatat adanya peningkatan dari 67,89% (2019) ke 67,98% (2020), diikuti kenaikan menjadi 68,12% (2021) dan 68,63% (2022), meskipun terdapat sedikit penurunan ke 69,42% (2023). Di Kotawaringin Timur, IPM mengalami peningkatan dari 71,16% (2019) ke 71,31% (2020), naik ke 71,38% (2021), mencapai 71,67%

(2022), dan akhirnya meningkat ke 72,21% (2023). Adapun di Kabupaten Kapuas, terlihat tren peningkatan yang muncul dari 69,38% (2019), 69,48% (2020), kemudian naik ke 69,63% (2021), mencapai 70,01% (2022), dan akhirnya meningkat ke 70,75% (2023). Sementara itu, di Kabupaten Katingan, IPM meningkat dari 68,55% (2019) ke 68,68% (2020), kemudian naik menjadi 68,89% (2021) dan 69,74% (2022) sebelum kembali mencapai 70,28% (2023). Secara keseluruhan, perbedaan tren antar kabupaten ini mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan pembangunan manusia dan kondisi ekonomi lokal sangat bervariasi. Hal ini menuntut adanya pendekatan kebijakan yang lebih terspesialisasi guna mencapai peningkatan IPM yang lebih konsisten dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi kompleksitas hubungan antara alokasi belanja modal, indeks pembangunan manusia (IPM), dan dinamika kemiskinan di Kalimantan Tengah sepanjang periode 2019 hingga 2023. Secara epistemologis, penelitian ini mengeksplorasi konfigurasi struktural kebijakan ekonomi daerah yang secara substantif berimplikasi pada kesejahteraan kolektif. Fokus utama analisis adalah menginterogasi keterpaduan strategi fiskal terhadap aksesibilitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam konteks penurunan angka kemiskinan serta optimalisasi modal sosial melalui investasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Paradigma teoritis yang diusung dalam kajian ini mengintegrasikan pendekatan makro dan mikro-ekonomi guna mengevaluasi korelasi antara determinan struktural dan *outcome* sosial. Selain itu, penelitian ini turut menelisik variabilitas spasial tingkat kemiskinan di berbagai kabupaten, dengan menelaah signifikansi heterogenitas kebijakan serta asimetri distribusi sumber daya dalam pembangunan regional. Analisis ekonomi-politik yang lebih mendalam menuntut dekonstruksi naratif deterministik terkait kemiskinan, dengan mengakui bahwa fenomena ini merupakan manifestasi dari kontingensi multidimensional yang melibatkan aspek ekonomi, politik, dan sosial-budaya.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor endogen yang mempengaruhi fluktuasi tingkat kemiskinan, tetapi juga mengelaborasi dampak eksogen dari pengalokasian belanja modal terhadap dinamika ekonomi daerah. Selain itu, penelitian ini mengartikulasikan bagaimana intervensi kebijakan fiskal, terutama melalui optimalisasi belanja modal yang dialokasikan dalam sektor-sektor strategis, dapat berfungsi sebagai instrumen dalam transformasi struktural ekonomi daerah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk memberikan perspektif holistik mengenai efektivitas kebijakan fiskal dalam mengurangi disparitas sosial sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Tengah. Dalam rangka mencapai tujuan ini, kajian ini akan mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan pemanfaatan analisis regresi berganda guna merumuskan relasi kausal antara variabel ekonomi yang diteliti. Dengan penyusunan model empiris yang rigor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang bernilai dalam diskursus kebijakan ekonomi daerah serta memberikan masukan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Mauludi & Nur Rahmawati (2023) IPM, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal memberikan hasil negatif signifikan terhadap kemiskinan.

Asnita et al. (2022) IPM dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan gap penelitian yang ada, hubungan antara alokasi belanja modal, Indeks Pembangunan Manusia, dan tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah pada periode 2019–2023 merupakan area kajian yang belum dieksplorasi secara mendalam. Eksplorasi lebih lanjut mengenai sinergi antara efisiensi pengalokasian belanja modal dan peningkatan IPM dalam menekan angka kemiskinan perlu diinvestigasi melalui studi ini. Penelitian ini akan berfokus

pada penerapan regresi linier berganda dengan data kuantitatif yang mendalam, serta mempertimbangkan variabel-variabel kontekstual tambahan yang memengaruhi dinamika kemiskinan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menawarkan perspektif strategis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan rencana aksi yang efektif, guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan keadilan sosial di daerah tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Kemiskinan

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai keberadaan dalam kondisi standar hidup yang terdegradasi, di mana terdapat keterbatasan substansial dalam pengelolaan sumber daya ekonomi guna memenuhi kebutuhan esensial harian. Manifestasinya tersinyal melalui aliran pendapatan yang tidak memadai, sehingga tidak mampu mendukung pencukupan kebutuhan primer maupun sekunder. Berdasarkan perspektif teoritis Todaro (2006), kemiskinan muncul ketika entitas individu atau kolektif gagal mencapai ambang batas finansial tertentu yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan ekonomi dan standar kehidupannya. Pengamatan terhadap dinamika kemiskinan menurut Nurkse (2006) mengemukakan adanya dualitas mekanisme jebakan kemiskinan, yang dapat dijabarkan melalui dua sumbu analisis: penawaran dan permintaan. Dari sudut pandang penawaran, defisit pendapatan masyarakat, yang tercermin dari rendahnya pendapatan, diatribusikan pada suboptimalitas produktivitas suatu kondisi yang menyulitkan akumulasi tabungan dan permodalan internal. Sebaliknya, dalam konteks permintaan, terutama di negara-negara berkembang, indikator alokasi modal investasi kerap menunjukkan nilai esensial yang mendekati ambang marginal, diperparah oleh keterbatasan diversifikasi serta volume pasar yang sempit, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Keseluruhan fenomena tersebut pada hakikatnya merupakan konsekuensi dari defisit produktivitas yang menimbulkan rentetan rendahnya pendapatan masyarakat (Santi Situmorang et al., 2024).

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah (91/PMK.05/2007 Tentang Bagan Akun Standar). Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual.

Menurut Subiyanto (2008), pengeluaran diklasifikasikan sebagai belanja modal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Alokasi dana tersebut mengakibatkan perolehan aktiva tetap atau instrumen aset lain yang berkontribusi pada perpanjangan umur ekonomis, peningkatan efisiensi manfaat, serta akumulasi kapasitas operasional;
2. Realisasi pengeluaran melampaui ambang minimum kapitalisasi aset tetap atau instrumen sejenis sebagaimana ditetapkan oleh kerangka regulasi pemerintah; dan
3. Akuisisi aktiva tersebut diaktualisasikan dengan intensi non-komersial, yakni tidak dirancang untuk dijual kembali.

Sedangkan, berdasarkan definisi Bastian (2014), belanja daerah merupakan integrasi penggunaan sumber daya keuangan yang mengakselerasi operasional institusi pemerintahan seperti sekretariat daerah, dinas-dinas birokrasi, dan entitas teknis operasional lainnya. Fungsi alokasi anggaran ini mencakup sektor pendidikan, kesehatan, serta berbagai fungsi publik lainnya yang berperan esensial dalam penyediaan layanan masyarakat.

Pengelompokan pengeluaran daerah dapat direkonfigurasi ke dalam beberapa kategori, antara lain:

1. Kelompok pengeluaran: seperti belanja administrasi umum, belanja operasional
-

beserta biaya pemeliharaan, serta belanja investasi;

2. Jenis pengeluaran: yang meliputi alokasi untuk remunerasi pegawai, pengadaan barang, mobilitas dinas, serta komponen pengeluaran non-spesifik lainnya;

Struktur belanja daerah: yang terbagi menjadi belanja rutin, belanja investasi, transfer fiskal, dan pengeluaran insidental.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Ketersediaan modal insan yang terakreditasi secara holistik memegang peranan vital dalam operasionalisasi pembangunan melalui mekanisme Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengukuran agregat capaian suatu bangsa dalam hal dinamika dan pertumbuhan pembangunan manusia dengan pendekatan kuantitatif yang representative akan lebih tersusun apabila difasilitasi oleh sumber daya manusia yang optimal dan bermutu tinggi. Menurut (Kuncoro, 2006) , IPM berfungsi sebagai instrumen komparatif untuk menilai heterogenitas tingkat pembangunan antar wilayah dan negara. Instrumen ini menstandarkan seberapa efektif komunitas memperoleh akses terhadap keluaran-keluaran pembangunan esensial, yang merupakan manifestasi hak-hak fundamental berupa kesempatan kerja, layanan kesehatan, pendidikan, serta pemanfaatan manfaat-manfaat sosial lainnya.

Lebih lanjut, Ginting (2008) mengemukakan bahwa strategi sentral dalam pengembangan manusia di Indonesia terletak pada usaha sistematis untuk mereduksi fenomena kemiskinan. Dalam konteks kelompok ekonomi rendah, alokasi sumber daya terhadap sektor kesehatan dan pendidikan memperoleh urgensi ekstra, mengingat eksistensi layanan yang terjangkau di kedua bidang tersebut berpotensi meningkatkan produktivitas dan akumulasi modal insan dengan signifikan. Dengan demikian, integrasi antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penggunaan IPM sebagai kerangka evaluatif menjadi pendorong esensial dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, guna mengatasi disparitas ekonomi sekaligus mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji pengaruh belanja modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah periode tahun 2019–2023. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi berganda, di mana data sekunder dianalisis untuk mengungkap hubungan empiris antara variabel-variabel Pembangunan melalui alokasi belanja modal dan capaian IPM dengan penurunan tingkat kemiskinan. Periode pengamatan yang digunakan adalah dari tahun 2019 hingga 2023, sehingga dinamika perubahan dalam alokasi belanja modal, peningkatan kualitas modal insan, dan upaya pengentasan kemiskinan dapat tergambarkan secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai mekanisme saling pengaruh antara peningkatan belanja modal dan IPM terhadap penurunan kemiskinan, yang esensial bagi perumusan strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder mengenai variabel belanja modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diduga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah. Cakupan spasial studi ini 6 Kabupaten di Kalimantan Tengah, yakni Kabupaten Suryan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Katingan. Data yang digunakan merupakan data panel time series periode 2019 hingga 2023, sehingga diperoleh total 30 observasi yang berbentuk data kuantitatif.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui dua tahap: pertama, pengumpulan data penting dari literatur yang telah dipublikasikan, seperti jurnal dan artikel ilmiah; kedua, pengumpulan data sekunder dari sumber-sumber resmi, yang meliputi Badan Pusat Statistik (BPS)

.....

Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta dokumen resmi dari instansi terkait. Teknik pengumpulan data melibatkan pencatatan langsung, penyalinan, dan pengunduhan dokumen dari berbagai sumber tersebut.

Data dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda dengan model sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kemiskinan

X1 = Belanja Modal

X2 = Indeks Pembangunan Manusia

β_0 = konstanta

ε = Error term

Pengujian hipotesis dilakukan dengan mengevaluasi nilai koefisien regresi dan menguji signifikansi untuk menentukan pengaruh setiap variabel independen terhadap Kualitas Hidup. Selain itu, pengujian asumsi klasik, meliputi multikolinearitas, heteroskedastisitas, normalitas residual, dan autokorelasi, dilakukan untuk memastikan validitas model regresi yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.657	5.598		1.904	.068		
	BM	.015	.006	.435	2.555	.017	.999	1.001
	IPM	-.085	.080	-.181	-1.062	.297	.999	1.001

a. Dependent Variable: K

Berdasarkan pada table hasil analisis uji multikolonaritas tidak terjadi regresi yang dipakai pada penelitian ini. Menunjukkan bahawa nilai tidak lebih dari 0,10. Variabel independen dalam model tersebut tidak mengalami multikolinearitas yang tinggi.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.65398676
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.095
	Negative	-.109
Test Statistic		.109
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Hasil Pengujian menunjukkan Tingkat signifikansi sebesar 0,200 yang mana ini melebihi nilai kritis 0,05, mengindikasikan bahwa distribusi residual adalah normal.

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.010	21.714		.645	.524
	BM	.017	.023	.139	.740	.465
	IPM	-.254	.311	-.154	-.819	.420

a. Dependent Variable: LN_RES

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada bukti statistic signifikan yang menunjukkan pengaruh variable independen terhadap variabel dependen. Terlihat dalam bentuk regresi bila besaran signifikan lebih dari 0,05. Simpulan tidak terjadi heteroskedastisitas

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.467 ^a	.218	.160	.67778	.351

a. Predictors: (Constant), IPM, BM

b. Dependent Variable: K

Berdasarkan table diatas uji autokorelasi regresi menampilkan hasil Durbin-Watson (DW) senilai 0,351 untuk menentukan adanya atau tidak adanya auto korelasi, dapat merujuk pada panduan yang diberikan oleh Santoso (2012; halaman 241). Hipotesis yang diajukan adalah tidak terdapat autokorelasi dalam model, karena nilai DW mempunyai hasil antara -2 atau +2 ($-2 < DW$

<+2), secara teoritis mengindikasikan bahwa data tidak memiliki autokorelasi.

REGRESI LINEAR BERGANDA

Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.467 ^a	.218	.160	.67778

a. Predictors: (Constant), IPM, BM

Matriks data yang tersaji menguraikan hasil komputasi koefisien determinasi (R^2), dengan menyoroti bahwa metrik *Adjusted R Square* yang berfungsi sebagai indikator daya eksplanatori model menunjukkan angka 0,160. Kuantitas ini mengimplikasikan bahwa kontribusi agregat dari konstelasi variabel-variabel independen yang diinvestigasi, yakni alokasi belanja modal dan indeks pembangunan manusia, mampu menerangkan 16% dari variabilitas empiris yang terobservasi pada fenomena kemiskinan. Konsekuensinya, porsi varians residual yang substansial, yakni sebesar 84%, dihipotesiskan diatribusikan kepada faktor-faktor lain yang tidak diendogenkan atau terakomodasi dalam spesifikasi model penelitian empiris ini. Meskipun pada pandangan pertama angka 84% variasi kemiskinan yang dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini tampak besar, hal tersebut tidak serta merta mengecilkan arti penting dari kontribusi 16% yang berhasil diidentifikasi dari variabel belanja modal dan IPM. Justru, dalam studi mengenai fenomena sekomples dan multifaset seperti kemiskinan, kemampuan untuk mengisolasi dan membuktikan bahwa dua variabel spesifik ini memiliki daya pengaruh sebesar 16% merupakan sebuah temuan yang krusial.

Angka 16% ini memberikan bukti empiris yang terukur bahwa intervensi pada belanja modal dan peningkatan kualitas IPM bukanlah upaya yang sia-sia, melainkan memiliki dampak konkret yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan. Daripada melihat 84% sebagai kelemahan, lebih tepat untuk memandangnya sebagai pengakuan atas realitas bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh jejaring sebab-akibat yang sangat luas, di mana banyak di antaranya bersifat kualitatif, kontekstual, atau sulit terukur secara seragam. Oleh karena itu, keberhasilan model ini dalam "merebut" 16% dari total variasi kemiskinan melalui variabel belanja modal dan IPM harus diapresiasi sebagai kontribusi ilmiah yang berharga, yang menunjuk pada tuas-tuas kebijakan potensial yang dapat dioptimalkan, sekalipun tidak menjelaskan keseluruhan gambaran besar fenomena kemiskinan yang memang sangat kompleks.

Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.458	2	1.729	3.764	.036 ^b
	Residual	12.403	27	.459		
	Total	15.861	29			

a. Dependent Variable: K

b. Predictors: (Constant), IPM, BM

Pada tabel di atas, hasil uji signifikan simultan (uji statistik F) menunjukkan bahwa nilai f hitung sebesar 3,764 dan tingkat signifikan sebesar 0,036, yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa belanja modal dan indeks pembangunan manusia berdampak positif dan signifikan terhadap kemiskinan di 6 Kabupaten Kalimantan Tengah dari tahun 2019 hingga 2023. Dengan demikian, hipotesis 3 dapat diterima.

Uji T (Sendiri)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.657	5.598		1.904	.068
	BM	.015	.006	.435	2.555	.017
	IPM	-.085	.080	-.181	-1.062	.297

a. Dependent Variable: K

Berdasarkan hasil uji signifikan parsial yang dilakukan pada tahun sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama (H1) telah ditetapkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kemiskinan yang diperlukan, menurut hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha):
 - a) Ho: Belanja Modal berpengaruh terhadap kemiskinan
 - b) Ha: Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kemiskinan

Merujuk pada sajian data tabelaris, diidentifikasi bahwa variabel Belanja Modal memperlihatkan parameter estimasi koefisien regresi (β) dengan magnitudo positif sebesar 0,015, serta mencatatkan aras signifikansi pada 0,017. Mengingat nilai probabilitas ini secara definitif berada di bawah ambang batas kritis α (alpha) sebesar 0,05, terdapat justifikasi empiris yang solid untuk merejeksi hipotesis nihil (H01) dan, konsekuensinya, mengakseptasi hipotesis alternatif (Ha1). Hal ini mengonfirmasi secara statistik bahwa belanja modal memanifestasikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap dinamika kemiskinan. Dengan demikian, postulat penelitian yang mengafirmasi eksistensi dampak determinan tersebut telah tervalidasi.

2. Indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, menurut hipotesis kedua (H2). Berikut ini adalah hipotesis nol (Ho) dan hipotesis

alternatif (Ha):

- a) Ho: Indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap kemiskinan
- b) Ha: Indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap kemiskinan

Merujuk pada tabulasi data yang disajikan, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memperlihatkan estimasi parameter koefisien regresi (β) dengan magnitudo negatif sebesar -0,085, disertai angka probabilitas (p-value) yang terobservasi pada 0,297. Mengingat nilai p-value ini melampaui ambang batas kritis α (alpha) sebesar 0,05, hal ini mengindikasikan ketiadaan bukti statistik yang cukup untuk menyokong asersi mengenai adanya pengaruh signifikan dari IPM terhadap kemiskinan. Konsekuensinya, diinferensikan bahwa IPM tidak memanifestasikan dampak yang secara statistik berarti atau determinan terhadap variasi tingkat kemiskinan dalam cakupan penelitian ini, sehingga hipotesis yang menyatakan pengaruh signifikan dari IPM termaktub ditolak.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemiskinan di Enam Kabupaten Kalimantan Tengah 2019 – 2023

Estimasi inferensial yang diadakan menunjukkan bahwa variabel belanja modal mengemukakan besaran koefisien kontekstual positif sebesar 0,015, disertai dengan nilai probabilitas (Sig) sebesar 0,017 yang memotong ambang batas 0,05, sehingga kondisi hipotesis nol dapat diterima secara statistik. Dengan demikian, hal tersebut mengindikasikan bahwa belanja modal menyuguhkan pengaruh positif yang signifikan terhadap indeks kemiskinan di enam Kabupaten Kalimantan Tengah pada periode 2019–2023.

Oleh karenanya, hipotesis yang menegaskan bahwa belanja modal berperan secara positif dan signifikan dalam memengaruhi variabel kemiskinan di enam kabupaten di wilayah Kalimantan Tengah selama rentang tahun tersebut dinyatakan terpenuhi. Namun demikian, temuan tersebut menyimpang dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mauludi & Nur Rahmawati, 2023) , yang mengemukakan bahwa belanja modal berkontribusi secara negatif dan signifikan terhadap dinamika kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada periode 2017–2021 secara langsung.

Hasil penelitian ini selaras dengan teori pertumbuhan endogen, ketika pemerintah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik, produktivitas serta kesejahteraan masyarakat akan meningkat, sehingga kemiskinan dapat berkurang. Selain itu, belanja modal yang dijalankan dengan baik mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperluas akses ke layanan dasar, dan mendukung kegiatan ekonomi di tingkat lokal.

Lebih lanjut, hasil kajian ini mendapat dukungan konseptual dari penelitian (Asnita et al., 2022) , yang menghimpun bukti empiris bahwa belanja modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Enam Kabupaten Kalimantan Tengah 2019 – 2023

Estimasi inferensial yang diadakan menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia mengemukakan besaran koefisien kontekstual negatif sebesar -0,085, disertai dengan nilai probabilitas (Sig) sebesar 0,297 yang melebihi ambang batas 0,05, sehingga kondisi hipotesis alternatif dapat diterima secara statistik. Dengan demikian, hal tersebut mengindikasikan bahwa indeks pembangunan manusia menyuguhkan tidak berpengaruh negatif yang signifikan terhadap indeks kemiskinan di

Enam Kabupaten Kalimantan Tengah pada periode 2019–2023.

Berdasarkan analisis, hipotesis yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan dan justru memiliki kecenderungan negatif terhadap kemiskinan di enam kabupaten di Kalimantan Tengah terbukti benar. Di sisi lain, temuan ini berbeda dari yang dilaporkan oleh (Asnita et al., 2022), yang menyatakan bahwa IPM memberikan kontribusi positif signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Selain itu, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan argumen teoretis dari UNDP yang menyebutkan bahwa peningkatan IPM melalui perbaikan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup seharusnya menurunkan kemiskinan. Namun, hasil ini mendukung temuan (Mauludi & Nur Rahmawati, 2023) yang menunjukkan bahwa IPM tidak memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada periode 2017–2021.

3. Pengaruh Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Enam Kabupaten Kalimantan Tengah 2019 – 2023

Verifikasi model melalui uji F mendemonstrasikan kebermaknaan statistik yang robus, dengan nilai hitung probabilitas sebesar 0,036, angka yang secara presisi berada di bawah patokan alfa 0,05. Temuan ini mengafirmasi bahwa variabel-variabel anteseden, yakni belanja modal dan indeks pembangunan manusia, ketika dianalisis secara agregat, memanifestasikan pengaruh yang determinan terhadap tingkat deprivasi ekonomi. Inferensi ini berkonvergensi dengan evidensi empiris dari risalah penelitian (Asnita et al., 2022), yang juga mengartikulasikan bahwa produk domestik regional bruto, alokasi belanja modal, serta pembangunan insan memiliki dampak signifikan terhadap permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Variabel belanja modal secara parsial menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di enam kabupaten di Kalimantan Tengah selama periode 2019–2023. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi dan efektivitas belanja modal berpotensi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah studi, sejalan dengan teori pertumbuhan endogen yang menekankan peran investasi pemerintah dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan.
 2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial tidak ditemukan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di enam kabupaten di Kalimantan Tengah selama periode 2019–2023. Meskipun secara teoretis peningkatan IPM diharapkan dapat menekan angka kemiskinan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks wilayah dan periode amatan, dampak IPM belum cukup kuat untuk secara statistik memengaruhi variasi tingkat kemiskinan secara signifikan.
 3. Secara simultan, variabel belanja modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di enam kabupaten di Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antara intervensi fiskal melalui belanja modal dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara kolektif memberikan dampak yang berarti terhadap dinamika kemiskinan.
 4. Koefisien determinasi (R-Square) sebesar 0,160 mengimplikasikan bahwa 16% variasi dalam tingkat kemiskinan di enam kabupaten di Kalimantan Tengah dapat dijelaskan oleh
-

variabel belanja modal dan Indeks Pembangunan Manusia. Meskipun sebagian besar variasi (84%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model, kontribusi 16% ini tetap dianggap krusial mengingat kompleksitas dan multifasetnya determinan kemiskinan, serta memberikan penekanan pada peran penting kedua variabel yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- 91/PMK.05/2007 - *Bagan Akun Standar* | *JDIH Kementerian Keuangan*. (n.d.). Retrieved March 24, 2025, from <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/91-pmk-05-2007>
- Asnita, A., Harlen, H., & Aulia, A. F. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Modal Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 801–810.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah*. (2025). <https://kalteng.bps.go.id/id>
- Bastian, I. (2014). *Audit sektor publik: pemeriksaan pertanggungjawaban pemerintah*.
- Demak, S. N. K., Masinambow, V. A. J., Londa³, A. T., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2020). PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN BELANJA KESEHATAN BELANJA MODAL DAN INFLASI TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA MANADO. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/28171>
- Estrada, A. A. E., & Wenagama, I. W. (2020). Pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 9(2), 233–261.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi pembangunan. Penerbit Salemba Empat, Jakarta*.
- Mauludi, A. A., & Nur Rahmawati, F. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017 s/d 2021. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1).
- mukarramah, Yolanda, C., & Zulkarnain, M. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Modal dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2), 105–117. <https://doi.org/10.0123/JSE.V3I2.1885>
- Portal Data SIKD*. (n.d.). Retrieved March 24, 2025, from <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Pratama, N., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(7), 651–680.
- Santi Situmorang, T. E., Natalia, D., Simanjong, L. A., Aulia, M., Dandi, N., Perwira Ompusunggu, D., & Ekonomi Dan Bisnis Universitas Palangka Raya, F. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Palangka Raya. *Nian Tana Sikka : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 117–125. <https://doi.org/10.59603/NIANTANASIKKA.V2I1.266>
- Subiyanto, I., & Halim, A. (2008). *Analisis investasi: belanja modal: sektor publik-pemerintah daerah*. Unit Penerbitan dan Percetakan, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Yayasan~....
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *PEMBANGUNAN EKONOMI, edisi 9, jilid 1*. Erlangga.